



**UNIKA SOEGIJAPRANATA**

perc. sirin karya smg

## R I N G K A S A N

Dalam rangka meningkatkan bisnis perbankan di Indonesia, menjadi bisnis yang mampu bersaing di pasar Internasional serta dalam rangka meningkatkan pembangunan ekonomi khususnya di bidang moneter, pemerintah melakukan perbaikan sistem perbankan, yang dilakukan secara bertahap dengan mengeluarkan beberapa kebijaksanaan di bidang perbankan.

Kebijaksanaan yang dikeluarkan pemerintah berupa paket kebijaksanaan yang mulai dikeluarkan pada Tahun 1983 berupa PAKJUN'83, kemudian disusul dengan PAKTO'88 yang menjadi dasar kemandirian bagi bank di Indonesia. Sebagai tindak lanjut dari PAKTO'88, pemerintah mengeluarkan PAKJAN'90, PAKFEB'91, dan PAKMEI'93, yang berfungsi sebagai pelaksana dari PAKTO'88.

Beberapa paket kebijaksanaan tersebut berisi ketentuan yang harus dipatuhi oleh semua bank, antara lain keharusan bagi bank untuk menghimpun dana dari masyarakat, kebebasan untuk menentukan besarnya suku bunga, baik kredit maupun deposito. Hal tersebut termuat dalam PAKJUN'83, sedangkan PAKTO'88 memberi kebebasan kepada semua bank untuk mendirikan kantor cabang, dan memberi kesempatan kepada perusahaan perbankan asing untuk membuka kantor cabang di beberapa kota besar di luar Jakarta, serta keharusan bagi bank milik pemerintah untuk menanamkan sebagian dananya kepada pengusaha

ekonomi lemah. Hal tersebut merupakan suatu upaya untuk membuat bank pemerintah mampu memenuhi kebutuhan dananya, oleh karena itu pemerintah menghapuskan hak pribadi bank pemerintah terhadap dana BUMN.

Sebagai tindak lanjut dari PAKTO'88 pemerintah mengeluarkan PAKJAN'90, yang mengatur mengenai pelaksanaan pemberian kredit tujuannya agar bank dan LKBB mampu bertindak sebagai pelaksana kredit yang mandiri, di bawah pengawasan Bank Indonesia.

Dalam rangka menghadapi persaingan dengan perusahaan perbankan yang lain, baik bank nasional maupun dengan perusahaan bank asing, pemerintah mengeluarkan kebijaksanaan yang mengatur mengenai tingkat kesehatan bank. Caranya dengan menentukan tingkat pengawasan dan pembinaan kepada semua bank. Bank Indonesia bertindak sebagai pengawas sekaligus sebagai pembina terhadap semua bank yang ada di Indonesia. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan mengenai cara meningkatkan pengawasan dan pembinaan yang harus dilakukan oleh masing-masing bank. Sebagai pelaksana dari ketentuan paket Februari 1991, pemerintah mengeluarkan PAKMEI'93.

Dengan keluarnya beberapa paket kebijaksanaan di bidang perbankan, membuat bank saling bersaing untuk menghimpun dana dari masyarakat, karena bank harus memenuhi kebutuhan dananya sendiri. Dengan dihapuskannya kredit likuiditas dari Bank Indonesia, bank akan

kesulitan memperoleh dana operasional. Untuk menghimpun dana dari masyarakat bank mengalami banyak kesulitan, terutama setelah keluarnya PAKTO'88 yang mengakibatkan banyaknya bank yang berdiri, membuat semakin besar persaingan diantara bisnis perbankan. Sehingga bank tidak lagi memperhatikan tingkat kesehatannya, terutama dalam mengeluarkan kredit ke pasaran akibatnya banyak bank yang mengalami kredit macet. Untuk mengatasi permasalahan tersebut pemerintah mengeluarkan ketentuan yang mengatur mengenai pembinaan dan pengawasan kepada semua bank, baik yang menyangkut manajemen maupun operasionalnya.

Dengan keluarnya beberapa paket kebijaksanaan tersebut membawa pengaruh bagi perkembangan dan perluasan usaha Bank Negara Indonesia 1946. BNI'46 berusaha mengikuti laju perkembangan bisnis perbankan di Indonesia, dengan melakukan beberapa upaya penyempurnaan dalam rangka melaksanakan ketentuan pemerintah tersebut. Usaha yang dilakukan BNI'46 dalam upaya menghimpun dana dari masyarakat, yaitu menentukan tingkat suku bunganya menjadi suku bunga yang wajar di pasaran, serta memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. BNI'46 juga telah membuka beberapa kantor cabang di seluruh wilayah Indonesia serta beberapa cabang di luar negeri. Dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat BNI'46 telah meningkatkan jenis dan kualitas dari produk yang dikeluarkan, serta memberikan kesempatan kepada

masyarakat untuk mengambil kredit di BNI, tidak hanya pengusaha kecil juga koperasi dan perusahaan perseorangan seperti home industri diberi kesempatan untuk mengambil kredit di BNI.

Dalam rangka membuat bank yang memenuhi standar kesehatan suatu bank, para pengelola BNI'46 menerapkan sistem desentralisasi bagi pelaksanaan pembinaan dan pengawasan interen perusahaan dan menjadi tanggung jawab seluruh personil BNI'46.

Dengan motto bahwa nasabah adalah "raja" BNI'46 mampu memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat, serta berhasil menunjukkan bank yang mandiri serta mampu bersaing di pasar Internasional. BNI'46 juga telah berhasil menunjukkan kepercayaan masyarakat akan eksistensi dan loyalitas perusahaannya.

Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah telah mengambil langkah bijaksana dalam menangani bisnis perbankan di Indonesia, dengan memberi perubahan secara bertahap kepada semua bank sampai menjadi bank yang mandiri. Cara efektif yang ditempuh untuk menciptakan bank pemerintah yang mandiri sepenuhnya yaitu dengan merubah status bank pemerintah menjadi Persero. Ini merupakan suatu usaha dari pemerintah untuk membuat bisnis perbankan yang mampu menjadi pelaksana dalam pembangunan, terutama mewujudkan tujuan pemerintah untuk meningkatkan perekonomian Indonesia di sektor perbankan yang mampu bersaing di dunia Internasional.





**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA**

Sekretariat : Jl. Pandanaran 100 Telp. 411176 Semarang + 50241

Badan Hukum : Yayasan Sandjojo

nomor : B.2.02/193/UKS.05/XI/1994  
 perihal : Mohon Ijin Survey / Penelitian  
 lamp. : -

17 Oktober 1994

kepada : Yth. Bapak,  
 Direktur PT. BNI 1946 Cabang Semarang  
 di Semarang

Dengan Hormat,  
 Sehubungan dengan permohonan mahasiswa Fakultas Hukum  
 Universitas Katolik Soegijapranata yang tersebut dibawah  
 ini :

Nama : Sulastri  
 Nim / Nirm : 90.20.600 / 90.6.111.01000.50010  
 Fakultas : Hukum  
 Alamat : Jl. Bintoro I/10 Semarang

Dengan ini kami mohon kebijaksanaan Bapak agar mahasiswa  
 tersebut diatas diperkenankan untuk mengadakan survey /  
 penelitian pada Kantor :

PT. Bank Negara Indonesia 1946 Cabang Semarang

Hasil survey / penelitian ini sangat diperlukan bagi  
 penyusunan Skripsi mahasiswa yang berjudul;

**PENGARUH PAKET DEREGULASI PERBANKAN TANGGAL 27 OKTOBER  
 1988 TERHADAP BANK NEGARA INDONESIA**

Kemudian harap menjadikan maklum dan atas perhatian  
 Bapak kami sampaikan terimakasih.

Dekan,  
 Pembantu Dekan I,  
 Soehing Wahyati Y. SH. MH.  
 Telp. : 058.184.006



tersebut : Yth.  
 1. Pembantu Rektor I sbg laporan  
 2. Dekan sbg laoran

Bank Negara Indonesia (Persero)

Haryono No. 16  
15573 - 515574 - 515575  
- 515577 Fax.  
ANG

No.: Smg/1/2155  
Hal: Riset.

Semarang, 18 OCT 1994

Kepada  
Yth. Sdr. Sulastri  
Jl. Bintoro I No.10  
Semarang.


Dengan ini kami beri tahukan bahwa permohonan riset yang Saudara mohon dengan surat dari P.H, UNIKA Soegijapranata No. B.2.02/067/UKS.05/IX/1994 tgl. 14-9-94 dapat kami setuju dengan syarat sbb.:

1. Mengisi formulir pernyataan terlampir dan materi riset harus tetap menjaga kerahasiaan Bank dan Jabatan yang berlaku di BNI.
2. Sebelum hasil riset ditik net dan diserahkan kepada Universitas Katolik Soegijapranata, harus diteliti dahulu oleh Divisi LPN KB. BNI Jakarta.
3. Menyerahkan hasil riset yang telah dibukukan kepada kami sejumlah satu buku.

Demikianlah harap maklum.

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO)  
KANTOR CABANG SEMARANG.



  
Ridwan Ismael  
Penimpit.

YAYASAN SANDJOJO  
FAKULTAS HUKUM UNIKA SOEGIJAPRANATA  
Jl. Pawiyatan Luhur VI/I Telp. 316142-311167 Semarang

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Pada hari ini ..... tanggal 4 - 5 - 1994 berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Semarang Nomor : A.50.01/3494/Kep/VII/1990 tanggal 31 Agustus 1990 perihal Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi :

I. Nama : Endang Wahyati Yusnia, SH.MH.  
Pangkat / Golongan : III/c / Lektor  
J a b a t a n : Pembimbing

II. Nama :  
Pangkat / Golongan :  
J a b a t a n :

Dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa yang tersebut dibawah ini sedang dalam Porses Pembimbingan Skripsi :

Nama : S U L A S T R I  
Nim / Nirm : 90.20.600 / 90.6.111.01000.50010  
Fakultas / Jurusan : HUKUM / KEPERDATAAN  
J u d u l : PENGARUH PAKET DEREGULASI 27 OKTOBER 1988  
TERHADAP BANK NEGARA INDONESIA 1946  
(Studi Kasus di Jawa Tengah)

NO	PROGRAM	TANGGAL	KETERANGAN
01	Penunjukan Dosen Pembimbing	04 - 5 - 1994	
02	Proposal	09 - 5 - 1994	
03	Rencana Penelitian	11 - 5 - 1994	
04	Kerangka Skripsi	30 - 5 - 1994	
05	Pengumpulan Data	1/6-8/7-1994	
06	Analisa Data	13/8-1/9-1994	
07	Penyusunan Laporan / Penulisan Skripsi	1/9-5/11-1994	

Demikian Berita Acara Bimbingan Skripsi ini dibuat untuk diketahui dan dipergunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Mengetahui

D e k a n,

*Henricus Sanyotohadi*

Henricus Sanyotohadi, SH.MHum.

Semarang, 4 Desember 1994  
Dosen Pembimbing

*Endang Wahyati Yusnia*

Endang Wahyati. Y, SH.MH.